

**KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT SEKITAR  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI**

***SOCIAL-ECONOMIC DISPARITY IN COMMUNITIES SURROUNDING OIL PALM  
PLANTATIONS IN TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY, JAMBI PROVINCE***

**Muhamad Hasan Sebyar\*<sup>1</sup>, Martina Ayu Wulandari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

\*Email penulis korespondensi: [muhamadhasan@stain-madina.ac.id](mailto:muhamadhasan@stain-madina.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terkait dampak sosial ekonomi industri kelapa sawit terhadap masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, terutama dalam konteks kesenjangan sosial ekonomi. Penelitian dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (sociological approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan beberapa hal; pertama; untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, penting untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan lahan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendistribusian lahan oleh pemerintah untuk di sewa atau digunakan kepada masyarakat. Kedua; untuk mengatasi mahalnya biaya pembukaan lahan dan perawatan kelapa sawit, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Salah satunya adalah melalui pendekatan berbasis agroekologi dan memberikan subsidi untuk pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian. Ketiga; untuk mengatasi masalah permodalan dan informasi yang terbatas, hal ini dapat dilakukan dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, lembaga riset pertanian, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap kredit dan pinjaman untuk petani kecil dan pemilik lahan yang ingin terlibat dalam industri kelapa sawit. Pemerintah juga harus menyiapkan satu platform yang terpercaya, teruji, dan lengkap sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Platform digital ini dapat diakses melalui aplikasi smartphone ataupun website, yang berisi informasi tentang harga pasar, ketersediaan pupuk dan obat, praktik pertanian yang baik, pelatihan dan pendidikan, dan pengumuman lainnya secara real-time. Ini dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur yang mungkin menghambat akses masyarakat lokal terhadap informasi.

Kata Kunci: kesenjangan sosial ekonomi, perkebunan, kelapa sawit

**ABSTRACT**

This research aims to analyze and provide solutions regarding the socio-economic impacts of the oil palm industry on the communities in Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province, particularly in the context of socio-economic disparity. Better research and understanding of this phenomenon can be the basis for designing more inclusive and sustainable policies, as well as efforts to reduce existing socioeconomic disparities. This research is a field research, the type of research chosen is descriptive qualitative research. The approach used is the sociological approach and the case approach. The results of this study show that to overcome this problem several things need to be done; first; To achieve social and economic justice, it is important to address inequality in land tenure in a fair and sustainable way. This can be done by distributing land by the government to be rented or used to the community. Second; To overcome the high cost of land clearing and oil palm maintenance, there are several steps that can be taken. One of them is through an agroecology-based approach and providing subsidies for the clearing and management of agricultural land. Third; To overcome the problem of limited capital and information, this can be done with the collaboration of various stakeholders, including governments, financial institutions, agricultural research institutions, and civil society organizations. One step that can be taken is to provide wider and affordable access to credit and loans for smallholders and landowners who want to get involved in the palm oil industry. The government must also prepare a platform that is trusted, tested, and complete so that it can be accessed by all parties. This digital platform can be accessed through a smartphone application or website, which contains information about market prices, availability of fertilizers and medicines, good agricultural practices, training and education, and

other announcements in real-time. This can help overcome geographical and infrastructural barriers that may hinder local people's access to information.

Keywords : socioeconomic inequality, plantations, oil palm

## PENDAHULUAN

Pertanian memiliki peran krusial dalam ekonomi nasional, tidak hanya sebagai penyedia makanan untuk populasi, tetapi juga sebagai penyumbang devisa, pencipta lapangan kerja, dan penunjang perkembangan sektor lain, khususnya dalam menyediakan bahan baku untuk industri. Pengembangan pertanian menjadi pilar penting dalam pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas. Salah satu sektor pertanian yang mendapat perhatian khusus adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit bisa dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam skala besar, maupun oleh petani secara mandiri. Namun, dalam perjalanannya subsektor ini sangat dipengaruhi oleh dinamika baik di tingkat nasional maupun global. Industri berbasis kelapa sawit memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan (Rohmelawati, 2020). Ekspansi kelapa sawit juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan investasi, produksi, dan penerimaan devisa. Industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga yang terlibat dalam usaha kelapa sawit.

Industri kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia, menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Helviani et al., 2021). Salah satu daerah yang sangat dipengaruhi oleh industri ini adalah Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Desa ini merupakan salah satu pusat produksi kelapa sawit yang cukup besar di Jambi. Pertumbuhan industri kelapa sawit di Desa ini telah memberikan dampak yang signifikan secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal. Seiring dengan berkembangnya industri ini, terdapat sejumlah perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Secara ekonomi, industri kelapa sawit telah menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Banyak dari mereka yang membuka lahan sawit untuk dijual ke perusahaan, sebagian bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai pegawai perusahaan, buruh tani atau pekerja harian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Selain itu, beberapa warga juga memperoleh manfaat dari peningkatan infrastruktur yang disediakan oleh perusahaan kelapa sawit, seperti jalan baru, sekolah, dan fasilitas kesehatan (Berlianto & Ruspianda, 2022).

Namun, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat signifikan, pertumbuhan industri kelapa sawit juga menimbulkan sejumlah masalah sosial di Desa Purwodadi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kesenjangan sosial ekonomi adalah fenomena di mana ada perbedaan yang signifikan dalam akses dan pengendalian atas sumber daya ekonomi, pendapatan, dan akses terhadap layanan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Di sekitar perkebunan kelapa sawit, kesenjangan ini termanifestasi dalam berbagai cara, termasuk perbedaan pendapatan antara pemilik kebun kelapa sawit, pekerja perkebunan dan masyarakat lokal yang tidak memiliki kebun kelapa sawit. Latar belakang ini menyoroti perlunya memahami secara lebih mendalam dampak sosial ekonomi industri kelapa sawit terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam konteks kesenjangan sosial ekonomi. Penelitian dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif (Sukiati, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data Peneliti melakukan pengamatan langsung (observasi) di lapangan untuk memahami secara mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat lokal, petani kelapa sawit, perwakilan perusahaan kelapa sawit, dan pihak terkait lainnya (Ramadhan, 2022). Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah responden kunci untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang pengalaman dan perspektif mereka terkait industri kelapa sawit dan dampaknya. Informan terdiri 16 orang dengan rincian 3 orang dari pihak perusahaan, 5 orang dari masyarakat lokal, 5 petani kelapa sawit, 2 orang pengurus Desa, dan 1 Orang pengurus koperasi kelapa sawit. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk cerita setelah dianalisis tanpa mencantumkan nama informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dampak Kesenjangan Ekonomi di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit**

Dampak Keberadaan Industri Kelapa Sawit salah satunya adalah kesenjangan ekonomi (Hardianti, 2021). Dampak dari kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal. Pertama-tama, kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu secara finansial menghadapi kesulitan dalam memperoleh lahan atau modal untuk terlibat dalam industri kelapa sawit, sementara mereka yang lebih berkecukupan mendominasi sektor tersebut. Hal ini dapat menciptakan dinamika yang tidak seimbang dalam perekonomian lokal, dengan sebagian masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada yang lain. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang lebih mampu memiliki akses yang lebih baik ke sekolah tinggi dan fasilitas kesehatan yang lebih berkualitas, sementara mereka yang kurang mampu terbatas dalam hal tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam taraf pendidikan dan kesehatan antara berbagai kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengekalkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Dampak lain dari kesenjangan ekonomi adalah ketegangan sosial di antara masyarakat. Ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka yang kurang mampu secara ekonomi dapat menyebabkan ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat. Konflik antara petani kecil dan perusahaan kelapa sawit atau antara masyarakat lokal dan pendatang dapat menjadi lebih dalam, hal ini terjadi akibat ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan (Utari et al., 2021). Selain itu, kesenjangan ekonomi juga merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga dapat membatasi pertumbuhan konsumsi dan investasi lokal. Hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang dalam perekonomian wilayah tersebut.

Untuk mengatasi dampak dari kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini termasuk langkah-langkah

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan dan peluang ekonomi, memperkuat infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan dialog dan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan mengurangi kesenjangan ekonomi, diharapkan bahwa wilayah sekitar perkebunan kelapa sawit dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua penduduknya.

Dalam mengeksplorasi dampak kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit, penting untuk mempertimbangkan implikasi lebih lanjut yang mungkin timbul dari ketidaksetaraan tersebut. Salah satu dampak yang signifikan adalah pada pemerataan pembangunan dan kemakmuran di wilayah tersebut. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di antara wilayah yang lebih makmur dan yang kurang berkembang. Wilayah yang terpinggirkan secara ekonomi mungkin menghadapi kendala dalam memperoleh akses terhadap infrastruktur penting seperti jalan, air bersih, dan listrik. Ini tidak hanya memperburuk kondisi hidup masyarakat di wilayah tersebut, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi dapat menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran lingkungan lainnya. Hal ini tidak hanya merugikan lingkungan secara langsung, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang dari industri kelapa sawit itu sendiri. Degradasi lingkungan yang berkelanjutan dapat mengurangi produktivitas lahan dan memperburuk kondisi hidup masyarakat lokal, menciptakan sebuah siklus yang sulit untuk dipecahkan (Muktasam, 2004).

Selanjutnya, kesenjangan ekonomi juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem politik dan sosial di wilayah tersebut. Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi mungkin memiliki akses yang lebih terbatas ke pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam representasi politik dan alokasi sumber daya publik, yang pada gilirannya dapat memperdalam ketidaksetaraan dan ketegangan sosial di wilayah tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa kesenjangan ekonomi bukanlah sesuatu yang mutlak negatif. Dalam beberapa kasus, kesenjangan ekonomi dapat memotivasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar (Rohmelawati, 2020). Misalnya, kesenjangan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Namun, ini hanya berlaku jika kesenjangan tersebut tidak terlalu ekstrem dan jika ada infrastruktur sosial dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung mobilitas sosial dan kesetaraan peluang.

Dengan demikian, untuk mengatasi dampak negatif dari kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi, serta mempromosikan dialog dan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit dapat diatasi, dan wilayah tersebut dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua penduduknya. Dalam mengeksplorasi dampak kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit, kita juga perlu mempertimbangkan aspek sosial yang terkait. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah meningkatnya ketegangan sosial dan konflik antara berbagai kelompok masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan di antara masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, yang mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan

bagian yang adil dari manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit. Ketegangan semacam ini dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik antara petani kecil dan perusahaan kelapa sawit, atau antara masyarakat lokal dan pendatang yang mungkin dianggap mendapat perlakuan istimewa.

Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tingkat stres, penyakit, dan ketidakstabilan sosial di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat yang kurang mampu juga mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan mobilitas sosial mereka.

Dampak dari kesenjangan ekonomi juga dapat dirasakan dalam hal kesejahteraan psikologis dan emosional masyarakat. Perasaan tidak aman secara ekonomi dan ketidakpastian tentang masa depan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya di antara masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat mengganggu hubungan sosial dan komunitas (Nurjannah & Budastra, 2004), serta mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Selain dampak-dampak tersebut, kesenjangan ekonomi juga dapat mempengaruhi pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya di masyarakat. Perempuan sering kali merupakan bagian dari kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, dan mereka mungkin menghadapi hambatan tambahan dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Hal ini dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mendorong kesenjangan gender yang lebih besar dalam wilayah tersebut (Nazri, 2022).

Untuk mengatasi dampak dari kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak dan penghasilan yang stabil, memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan, serta mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi bagi semua kelompok masyarakat. Penting juga untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi semua penduduknya. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil termasuk penyediaan bantuan dan dukungan kepada petani kecil dan masyarakat lokal dalam meningkatkan produktivitas dan akses mereka terhadap pasar, serta penguatan infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Ini dapat mencakup pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan layanan keuangan yang inklusif, dan program-program bantuan sosial yang ditargetkan kepada kelompok rentan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik-praktik pembangunan yang diadopsi oleh perusahaan kelapa sawit juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi mereka terhadap masyarakat lokal, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari industri tersebut didistribusikan secara adil di seluruh wilayah tersebut. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa dampak negatif dari kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit dapat dikelola dengan efektif, dan wilayah tersebut dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua penduduknya. Ini akan memastikan bahwa industri kelapa sawit dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang positif, tanpa meninggalkan siapapun di belakang.

### **Kesenjangan Kepemilikan Lahan Menyebabkan Kesenjangan Ekonomi**

Kesenjangan kepemilikan lahan adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam kepemilikan dan kontrol atas tanah antara berbagai kelompok masyarakat. Penyebab utama dari kesenjangan kepemilikan lahan di sekitar perkebunan kelapa sawit bisa

disebabkan oleh faktor historis, politis, dan ekonomi. Kebijakan agraria yang tidak adil dan praktik-praktik *land grabbing* menyebabkan akumulasi tanah oleh pihak-pihak yang lebih kuat ekonominya, seperti perusahaan kelapa sawit dan masyarakat menengah ke atas, sementara masyarakat lokal hanya memiliki sawit sesuai pembagian jatah dari pemerintah dan susah untuk mengembangkan perkebunan baru. Meskipun demikian, perlahan-lahan kontribusi dalam perekonomian yang berasal dari sub-sektor perkebunan kelapa sawit sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Kelapa sawit mengubah petani miskin menjadi pengusaha secara umum, keberhasilan pengembangan kelapa sawit Indonesia telah mengubah 3,7 juta keluarga miskin (petani) menjadi pengusaha kelapa sawit (Mega & Nirmalasari, 2022). Namun, masih menyisakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang jika tidak diatasi secara berkelanjutan.

Kesenjangan kepemilikan lahan dapat menjadi pemicu utama dari kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit. Keterbatasan akses terhadap tanah dan sumber daya alam dapat menghambat kemampuan masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pertanian atau bisnis lainnya, sehingga memperdalam ketimpangan ekonomi antara mereka dan pemilik tanah yang luas atau perusahaan kelapa sawit. Dalam konteks ini, upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit juga harus mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan. Ini bisa melibatkan implementasi kebijakan agraria yang lebih adil, perlindungan hak tanah masyarakat lokal, dan pemberdayaan ekonomi bagi petani kecil untuk memiliki dan mengelola lahan secara mandiri. Dengan demikian, pengurangan kesenjangan kepemilikan lahan dapat menjadi langkah penting menuju pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit.

Menurut beberapa pihak para pendatang lebih mendominasi dibandingkan warga pribumi di sekitar kawasan industri, gejala ini ditimbulkan karena adanya kesenjangan hidup dan pendapatan pada masyarakat, sehingga timbul kecemburuan sosial yang akhirnya mendorong sikap untuk berperilaku anarkis. Keberadaan industri pada kenyataannya juga dapat menimbulkan merosotnya nilai-nilai moral, kebudayaan dan agama (Hardianti, 2021). Namun, sebagian orang memanfaatkan nama adat untuk meraup kepentingan golongannya saja, tentu hal ini juga tidak dibenarkan. Sebagian masyarakat tidak memiliki lahan, sementara sebagian lainnya memiliki lahan yang luas, hal ini justru dapat meningkatkan ketimpangan yang signifikan dalam kepemilikan tanah di sekitar perkebunan kelapa sawit (Adinda et al., 2022). Kondisi ini dapat menjadi sumber utama ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Masyarakat yang tidak memiliki lahan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan mata pencaharian dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka, sementara mereka yang memiliki lahan yang luas memiliki lebih banyak sumber daya dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Fenomena ini terjadi karena tidak ada perhatian pemerintah terhadap kesenjangan tersebut, setidaknya pemerintah bisa membuka lahan hak guna dan bantuan modal, untuk dikelola oleh mereka yang tidak memiliki lahan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, penting untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan lahan dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Kehadiran pendatang yang tidak memiliki kebun juga menjadi faktor tambahan yang menyumbang ketimpangan dalam kepemilikan lahan. Kondisi ini dapat menciptakan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks di mana pendatang menghadapi kesulitan dalam menemukan sumber daya dan penghidupan di wilayah tersebut. Hal ini bisa menciptakan ketegangan sosial dan persaingan yang meningkat antara pendatang dan masyarakat lokal atas sumber daya terbatas yang tersedia di wilayah tersebut, termasuk lahan pertanian. Kesenjangan dalam kepemilikan lahan juga timbul akibat disparitas dalam modal yang dimiliki oleh masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan finansial antara kelompok-kelompok masyarakat

menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Masyarakat yang memiliki modal finansial yang lebih besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk membeli dan buka lahan perkebunan kelapa sawit, sementara masyarakat dengan modal yang terbatas kesulitan untuk bersaing dalam hal tersebut. Ketidaksetaraan dalam kepemilikan lahan sering kali mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi modal di masyarakat. Beberapa orang yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa atau pihak bank memiliki peluang lebih besar memperoleh akses permodalan yang memadai, sementara masyarakat biasa susah memperoleh permodalan.

Beberapa masyarakat menambah sumber pendapatannya dengan membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Pendapatan masyarakat semakin meningkat dikarenakan masyarakat mulai sadar akan peluang ekonomi yang ada (Putri, 2022), dan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Namun disayangkan bagi masyarakat lokal sangat mahal biaya untuk membuka kebun baru. Sehingga hanya pemodal besar dan orang yang memiliki akses akan modal lah yang dapat membuka lahan baru untuk ditanami kelapa sawit. Pendistribusian lahan oleh pemerintah untuk di sewa atau digunakan kepada masyarakat dalam kegiatan berkebun kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kesenjangan dalam kepemilikan lahan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih adil kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan mendistribusikan lahan kepada masyarakat secara lebih merata, diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam kepemilikan lahan dan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk yang tidak memiliki lahan, untuk terlibat dalam industri kelapa sawit. Langkah ini juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif. Namun, terkadang pendistribusian lahan tidak mencapai keadilan yang diharapkan, karena cenderung hanya diarahkan kepada sejumlah orang tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap lahan dan kesempatan ekonomi, serta meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat. Kesimpangsiuran dalam pendistribusian lahan bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti nepotisme, korupsi, atau pengaruh politik, yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pembagian yang tidak adil.

### **Mahalnya Biaya Pembukaan Lahan dan Perawatan Kelapa Sawit**

Mahalnya biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit telah menjadi salah satu faktor utama yang dihadapi oleh petani dan pemilik kebun kelapa sawit di Purwodadi. Hal ini penting menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi petani, keberlanjutan industri kelapa sawit, dan lingkungan. Mahalnya biaya tersebut mencakup berbagai hal seperti pembelian benih yang berkualitas, penggunaan pupuk yang mahal dan pendistribusian tidak merata, pestisida, dan herbisida, upah tenaga kerja saat panen, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan lahan dan tanaman. Peningkatan harga input ini menjadi beban finansial yang signifikan bagi petani, terutama bagi yang memiliki kebun dalam skala kecil atau menengah. Salah satu faktor yang menyebabkan mahalnya biaya pengelolaan lahan adalah ketergantungan pada teknologi modern dan bahan kimia (Purnamayani et al., 2022). Meskipun teknologi modern dan penggunaan bahan kimia tertentu dapat meningkatkan produktivitas dan mengendalikan hama dan penyakit, biaya pembelian dan penggunaan produk-produk ini seringkali tinggi. Petani seringkali terjebak dalam siklus di mana mereka harus terus-menerus menginvestasikan uang untuk membeli bahan-bahan ini agar tetap menghasilkan kelapa sawit yang berkualitas.

Selain itu, kenaikan harga bahan bakar juga berkontribusi pada mahalnya biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit. Bahan bakar diperlukan untuk operasi traktor, pompa irigasi, dan transportasi hasil panen. Kenaikan harga bahan bakar, yang seringkali tidak

sebanding dengan kenaikan harga jual kelapa sawit, menyebabkan beban tambahan bagi petani. Peningkatan biaya hidup juga menambah mahal biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit. Ini berdampak pada upah yang harus dibayar oleh petani kepada pekerja mereka, kosumsi, serta pada biaya-biaya lain yang harus mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam proses perawatan perkebunan kelapa sawit. Selain itu pada musim hujan dapat mengganggu produksi kelapa sawit dan meningkatkan biaya pada proses perawatan dan pemanenan. Dampak dari mahal biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit sangat dirasakan oleh petani, terutama mereka yang memiliki kebun dalam skala kecil. Biaya tinggi ini dapat mengurangi profitabilitas usaha mereka, bahkan dapat menyebabkan kerugian finansial. Selain itu, mahal biaya ini juga dapat menghambat pertumbuhan sektor kelapa sawit secara keseluruhan, karena dapat mengurangi minat petani untuk terjun ke dalam industri ini atau membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Beberapa karyawan juga mengalami kendala yang sama, pendapatan karyawan di perusahaan kelapa sawit cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan, rata-rata yang kerja di perusahaan kelapa sawit memiliki gaji 2 juta rupiah – 5 juta rupiah tergantung status pekerjaan di perusahaan tersebut (Y. Setiawan & Nuryadin, 2021). Namun, rata-rata dari mereka akan mengeluhkan terkait biaya membuka lahan atau replanting dan biaya perawatan kelapa sawit. Karena gaji mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Salah satunya adalah melalui pendekatan berbasis agroekologi yang menekankan pada penggunaan metode organik dan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan lahan dan perawatan tanaman. Metode ini dapat membantu mengurangi ketergantungan petani pada bahan kimia yang mahal dan mengurangi biaya pengelolaan lahan secara keseluruhan. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga pembangunan dapat membantu mengurangi beban finansial bagi petani. Subsidi untuk pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian, seperti biaya buka lahan dan replanting, pupuk organik atau alat-alat pertanian yang efisien energi, dapat membantu mengurangi biaya pengelolaan lahan. Program pelatihan dan bimbingan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diutuhkan oleh petani untuk mengelola lahan mereka dengan cara yang efisien dan berkelanjutan.

Seringkali pendistribusian pupuk subsidi tidak merata (Setiawan et al., 2020), karena faktor-faktor nepotisme, korupsi, dan politik golongan. Hal ini menyebabkan petani harus membeli pupuk di toko-toko dengan harga yang 2 kali lipat (tidak subsidi). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akses petani ke bahan-bahan untuk membantu mengatasi mahal biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit. Tentu hal ini memerlukan platform yang menghubungkan petani dengan ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pupuk dan lainnya. Dengan hal ini, diharapkan mahal biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit dapat dikurangi, yang akan menguntungkan petani, industri kelapa sawit secara keseluruhan, dan lingkungan.

#### **Akses Permodalan dan Informasi Terbatas**

Akses terbatas terhadap permodalan dan informasi merupakan hak yang menyebabkan kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit semakin besar. Permodalan yang terbatas menjadi hambatan utama bagi masyarakat lokal yang ingin terlibat dalam industri kelapa sawit. Banyak petani kecil atau mereka yang tidak pemilik lahan sangat sulit mendapatkan akses modal yang cukup untuk membuka lahan, membeli benih yang berkualitas, pupuk, atau pestisida yang diperlukan untuk memulai atau mengelola kebun kelapa sawit. Tanpa modal yang memadai, petani tidak mampu untuk mengoptimalkan produksi, justru hal ini dapat mengurangi pendapatan mereka dan memperburuk kesenjangan sosial ekonomi. Selain itu, akses terbatas terhadap informasi juga menjadi kendala yang signifikan bagi masyarakat lokal. Sebagian besar akses hanya bagi pejabat desa, anggota koperasi, dan

perusahaan serta keluarganya. Padahal informasi yang tepat dan terperinci tentang permodalan, praktik pertanian yang baik, teknologi pertanian terbaru, pasar, dan peluang ekonomi dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas mereka dan mengoptimalkan hasil panen mereka. Namun, masyarakat lokal sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke sumber informasi ini, baik karena kurang terbukanya penyaluran informasi, keterbatasan infrastruktur komunikasi atau karena kurangnya aksesibilitas ke program-program pelatihan dan pendidikan.

Ketidakmampuan untuk mengakses informasi tentang harga pasar yang berlaku, misalnya, dapat membuat petani kurang dapat mengoptimalkan pendapatannya dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada (Zainuddin, 2019). Seringkali petani menjual sawitnya dengan harga murah, karena tidak tahu harga pasar yang sebenarnya. Begitu pula, ketidakmampuan untuk memperoleh informasi tentang praktik pertanian yang berkelanjutan atau solusi teknologi pertanian inovatif dapat menghambat petani dalam meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada bahan-bahan pertanian yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, lembaga riset pertanian, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap kredit dan pinjaman untuk petani kecil dan pemilik lahan yang ingin terlibat dalam industri kelapa sawit. Ini dapat dilakukan melalui program-program pemerintah atau kemitraan dengan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan inklusif lainnya. Penting juga untuk meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap informasi melalui penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan yang relevan. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga riset pertanian, universitas, atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian dan pembangunan pedesaan. Program-program ini dapat membantu petani dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka, mengelola kebun kelapa sawit mereka secara efisien, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.

Di era digitalisasi seperti sekarang ini, semua orang dapat mengakses informasi dengan cepat (Ramadhan, 2022), melalui youtube dan media lainnya, namun hal ini tidak akurat dan belum teruji. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan satu platform yang terpercaya, teruji, dan lengkap sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Platform digital ini dapat diakses melalui aplikasi smartphone ataupun website, yang berisi informasi tentang harga pasar, ketersediaan pupuk dan obat, praktik pertanian yang baik, pelatihan dan pendidikan, dan pengumuman lainnya secara real-time (Mahran & Sebyar, 2023). Ini dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur yang mungkin menghambat akses masyarakat lokal terhadap informasi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa akses terbatas terhadap permodalan dan informasi di sekitar perkebunan kelapa sawit dapat diatasi, dan masyarakat lokal dapat lebih baik memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh industri kelapa sawit. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial masyarakat lokal secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Industri kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia, menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri kelapa sawit di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga telah memberikan dampak yang signifikan secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal. Secara ekonomi, industri kelapa sawit telah menciptakan peluang kerja bagi

masyarakat setempat. Banyak dari mereka yang membuka lahan sawit untuk dijual ke perusahaan, sebagian bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai pegawai perusahaan, buruh tani atau pekerja harian, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Selain itu, beberapa warga juga memperoleh manfaat dari peningkatan infrastruktur yang disediakan oleh perusahaan kelapa sawit, seperti jalan baru, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Namun, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat signifikan, pertumbuhan industri kelapa sawit juga menimbulkan sejumlah masalah sosial di Desa Purwodadi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi karena adanya perbedaan yang signifikan dalam akses dan pengendalian atas sumber daya ekonomi, pendapatan, dan akses terhadap layanan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.

### Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian meliputi *pertama*; untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, penting untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan lahan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendistribusian lahan oleh pemerintah untuk di sewa atau digunakan kepada masyarakat. *Kedua*; untuk mengatasi mahalnya biaya pembukaan lahan dan perawatan kelapa sawit, dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis agroekologi yang menekankan pada penggunaan metode organik dan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan lahan dan perawatan tanaman. Metode ini dapat membantu mengurangi ketergantungan petani pada bahan kimia yang mahal dan mengurangi biaya pengelolaan lahan secara keseluruhan. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan dengan memberikan subsidi untuk pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian, seperti biaya buka lahan dan replanting, pupuk organik atau alat-alat pertanian yang efisien energi, dapat membantu mengurangi beban finansial bagi petani. Selain itu, diperlukan juga peningkatan akses petani ke bahan-bahan pertanian melalui platform digital yang menghubungkan petani dengan ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pupuk dan lainnya. *Ketiga*; untuk mengatasi masalah permodalan dan informasi yang terbatas, dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, lembaga riset pertanian, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap kredit dan pinjaman untuk petani kecil dan pemilik lahan yang ingin terlibat dalam industri kelapa sawit. Ini dapat dilakukan melalui program-program pemerintah atau kemitraan dengan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan inklusif lainnya. Penting juga untuk meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap informasi melalui penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan yang bisa diakses secara digital langsung dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan satu platform yang terpercaya, teruji, dan lengkap sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Platform digital ini dapat diakses melalui aplikasi smartphone ataupun website, yang berisi informasi tentang harga pasar, ketersediaan pupuk dan obat, praktik pertanian yang baik, pelatihan dan pendidikan, dan pengumuman lainnya secara real-time. Ini dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur yang mungkin menghambat akses masyarakat lokal terhadap informasi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua informan yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih juga untuk Martina Ayu Wulandari, M.Pd yang telah membantu menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A. R. A., Arkanudin, A., Purnama, D. T., & Batualo, I. D. (2022). Perubahan pola kehidupan masyarakat adat: Studi etnografi pada masyarakat Dayak Ribun di sekitar perkebunan kelapa sawit Parindu Kabupaten Sanggau. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6(2), 242–254. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21523>
- Berlianto, A., & Ruspianda, R. (2022). Dampak Keberadaan Pabrik Kelapa Sawit Pt.Sinar Utama Nabati (Sun) Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer*, 5(2), 187–195.
- Hardianti, M. H. (2021). Dampak Keberadaan Industri Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. In *Perpustakaan Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau*.
- Helviani, H., Kasmin, M. O., Juliatmaja, A. W., Nursalam, N., & Syahrir, H. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Perkebunan Kelapa Sawit PT. Damai Jaya Lestari di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Agro Bali : Agricultural Journal*, 4(3), 467–479. <https://doi.org/10.37637/ab.v4i3.773>
- Mahran, A. Z., & Sebyar, M. H. (2023). Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia Muhamad Hasan Sebyar. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 51–67. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1440>
- Mega, M., & Nirmalasari, Z. D. D. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Social Economic Condition Of Communities Around Palm Plantation PT . Citra Niaga Perkasa. *Jurnal Artikel*, 5(2), 394–404.
- Muktasam. (2004). Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ( Hkm ) di Batukliang Utara – Lombok Tengah Social and Institutional Analysis of Community Forest Managament in North Batukliang – Central Lombok. *Agrimansion*, 04(02), 168–183.
- Nazri, M. F. H. (2022). *Reaksi Tokoh Perempuan terhadap Ekspansi Perkebunan Kelapa*. 11, 232–243. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jentera/article/download/3247/1931>
- Nurjannah, S., & Budastra, K. (2004). Unsur - Unsur Model Pembangunan Ekonomi Pedesaan Tinjauan Teoritis. *Agrimansion*, 5(1), 34–40. <http://agrimansion.unram.ac.id/index.php/Agri/article/view/125>
- Purnamayani, R., Dariah, A., Syahbuddin, H., Tarigan, S. D., & Sudradjat, S. (2022). Best Practices Pengelolaan Air Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 16(1), 9. <https://doi.org/10.21082/jsdl.v16n1.2022.9-21>
- Putri, M. (2022). *Impact of the Existence of Oil Palm Processing Companies on Social Economic Conditions of Pemuar Village Community*. 24(3), 1270–1280.
- Ramadhan, Q. G. (2022). *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat*. Institusi Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rohmelawati. (2020). *Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kecamatan Mentohi*. 9(1), 31–34.
- Setiawan, B. D., Arfa'i, A., & Nur, Y. S. (2020). Motivasi, Permasalahan Dan Alternatif

- Solusi Program Siska (Sistem Integrasi Sapi Dan Kelapa Sawit) Di Kabupaten Pasaman Barat. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 3(2), 141–152. <https://doi.org/10.25077/bina.v3i2.205>
- Setiawan, Y., & Nuryadin, M. R. (2021). *Dampak Perusahaan Kelapa Sawit terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar di Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru*. 4(2), 6.
- Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*. Perdana Publishing.
- Utari, S. R., Zubir, Z., & Lindayanti, L. (2021). Analisa Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau Antara Masyarakat Dengan Perusahaan (STUDI TENTANG PTPN V, PT SRK 1980-2019)1. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Zainuddin, M. (2019). Implikasi Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Pihak Swasta Terhadap Produksi Petani Kelapa Sawit. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 108–114. <http://journal.lldikti9.id/sosiosains>